

THE ROLE OF CITIZENSHIP EDUCATION AS A FOUNDATION OF DEMOCRACY IN INDONESIA

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI FONDASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Mochamad Abhyasa Favian Saviola¹ , Fachri Abdillah² , Afidah Lailatul Khasanah³ , Ririn agustin kartika putri⁴ , Fitria Aura Nada Nirmala⁵ , Imam Ghazali⁶

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail:

¹23041010185@student.upnjatim.ac.id, ²23041010197@student.upnjatim.ac.id,

³23041010200@student.upnjatim.ac.id, ⁴23041010205@student.upnjatim.ac.id,

⁵23041010265@student.upnjatim.ac.id, ⁶imamgh284@gmail.com

Abstract

This article explores the role of Citizenship Education (PKn) as the foundation of democracy in Indonesia. Through a qualitative approach with library research methods, the data collection technique used is document study (books, journal articles, etc.). The research results show that Citizenship Education is a learning process that is focused on developing good and intelligent Indonesian citizens. By upholding this noble goal and responding to the needs of the times, Citizenship Education must become a science that has an interdisciplinary, multidisciplinary and even transdisciplinary approach. And Civics also plays a significant role in forming democratic character and attitudes in students. Civics helps increase awareness of the rights and obligations of citizens, promotes the values of tolerance, active participation and respect for human rights. Citizenship education also contributes to strengthening democracy through community participation in political and social processes. However, there are challenges in implementing Civics, such as a lack of resource support, varying teaching quality, and low understanding of the importance of Civics among the community and policy makers. In conclusion, to maximize the impact of Civics as the foundation of democracy in Indonesia, ongoing commitment is needed from all stakeholders, including the government, educators and society.

Keywords: Citizenship Education, Democracy, Foundations

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai fondasi demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (buku, artikel jurnal, dll). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses pembelajaran yang difokuskan untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. Dengan menjunjung tujuan mulia tersebut serta untuk menjawab kebutuhan zaman, membuat Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi suatu ilmu yang memiliki pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner. Dan PKn juga berperan signifikan dalam membentuk karakter dan sikap demokratis pada peserta didik. PKn

membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, mempromosikan nilai-nilai toleransi, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan Kewarganegaraan juga berkontribusi pada penguatan demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial. Meski demikian, terdapat tantangan dalam implementasi PKn, seperti kurangnya dukungan sumber daya, kualitas pengajaran yang bervariasi, serta rendahnya pemahaman akan pentingnya PKn di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan. Kesimpulannya, untuk memaksimalkan dampak PKn sebagai fondasi demokrasi di Indonesia, diperlukan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat.

Kata Kunci: : Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Fondasi

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses pembelajaran yang difokuskan untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. Dengan menjunjung tujuan mulia tersebut serta untuk menjawab kebutuhan zaman, membuat Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi suatu ilmu yang memiliki pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner. Selaras dengan Karidadi (2016: 18) yang menegaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan apabila ditinjau dari perspektif kurikuler pendidikan berwawasan global, serta untuk mengatasi kemajuan zaman, maka kurikulumnya perlu bersifat interdisipliner, multidisipliner, serta transdisipliner”(Pendidikan, 2023). Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai potensi ancaman internal dan eksternal memberikan kontribusi terhadap kajian perkembangan ilmu dan pengetahuan di Indonesia, khususnya yang berorientasi pada pembentukan karakter warga negara yang semakin dinamis dan kompleks, karena memberikan kontribusinya terhadap kelangsungan hidup bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan warga negara menjadi demokratis. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan membekali siswa dengan pemahaman dan pembiasaan untuk berperilaku demokrasi. Pendidikan harus memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam mengembangkan kehidupan(cora, 2013). Salah satu cara untuk membentuk warga negara yang demokratis adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Demokrasi sendiri merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang

dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak(HARIYANTO, 2021).

Permasalahan berbangsa dan bernegara yang perlu disorot adalah mengenai pemilihan umum. Pemilihan umum dapat menjadi konflik horizontal diantara masyarakat. Berbagai isu-isu politik seperti kampanye hitam dapat membuat keretakan ditengah keharmonisan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena masih ada masyarakat yang belum bisa menyikapi makna demokrasi dengan dewasa(Aragati et al., 2024). Dirasa perlu untuk memahami budaya demokrasi. Dengan memahami budaya demokrasi dapat memberikan kekuatan baru bagi demokrasi, menjadikannya lebih dewasa, dan dapat menerima proses dan hasil demokrasi. Selain itu, kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diperkuat. Langkah-langkah dan upaya sistematis yang harus dilakukan untuk memperkuat masyarakat dilakukan bersamaan dengan pendidikan kewarganegaraan dan secara konseptual berfungsi sebagai sarana pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia untuk membentuk masyarakat yang berperadaban di Indonesia(Sugara, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (buku, artikel jurnal, prosiding konferensi, jurnal, tesis, disertasi, berita online, peraturan perundang-undangan, dll). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau content analysis. Analisis isi meliputi 1) mengintegrasikan data, 2) mengklasifikasikan data, 3) memberikan kode pada data yang diperoleh dan menganalisis data, 4) menyederhanakan data, 5) menarik kesimpulan, dan 6) mengkomunikasikan.

Kesimpulan ini menjadi landasan utama untuk memberikan rekomendasi kepada beberapa pemangku kepentingan, khususnya mengenai peran pendidikan kewarganegaraan.

Hasil dan Pembahasan

1) Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat Demokrasi di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam demokrasi indonesia, seperti melalui pembelajaran kontekstual yang berfokus pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah, pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa membentuk perilaku yang demokratis, karena dengan adanya mahasiswa yang memiliki pola pikir berprinsip pada demokrasi, pastinya memiliki moralitas, kekuatan, dan solidaritas yang tinggi, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional(Winaputra, 2014). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran yang partisipatif terhadap demokrasi indonesia, yakni mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik seperti diskusi publik dan pemilu, serta berbagai bentuk partisipasi masyarakat lainnya. Akibatnya, warga negara menjadi lebih aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik dan memperkuat demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan warga negara untuk menerima dan menghargai perbedaan serta bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Melalui cara ini, warga negara dapat menghargai dan menghormati keberagaman dan mencegah konflik sosial(Fatimah U et al., 2023). Selain itu, dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, Pendidikan kewarganegaraan pastinya membutuhkan adanya dukungan serta rekomendasi kebijakan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat, diantaranya:

- **Penguatan Kebijakan:** Pendidikan kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 kepada mahasiswa, membangun rasa cinta tanah air dan patriotisme yang kuat. Hal ini mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang taat hukum, disiplin dan bertanggung jawab dalam pembangunan negara. Pandangan ini sangat penting untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah.
- **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jika seseorang sadar bahwa mereka berhak untuk didengar dan terlibat dalam pengambilan

keputusan, mereka akan lebih cenderung ikut serta dalam berpartisipasi. Sebaliknya, jika mereka tahu bahwa harus berkontribusi dan mematuhi aturan, mereka akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Mereka juga akan lebih tertarik untuk mencari solusi dan mendorong perubahan positif.

- Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum: Mengingat dinamika zaman yang terus berubah dan berkembang, menimbulkan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, evaluasi dan pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan harus dilakukan secara teratur, dengan memastikan relevansi dengan kebutuhan masa kini. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan harus selalu disesuaikan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting agar materi dan teknik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tetap relevan dan mampu menangani berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini, terlebih di semua jenjang Pendidikan.

2) Studi atau Penelitian yang Menunjukkan Hubungan Antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan Tingkat Partisipasi Demokratis di Indonesia

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan tingkat partisipasi demokrasi di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pendidikan kewarganegaraan memiliki korelasi signifikan dengan partisipasi politik pemilih pemula. Mahasiswa yang menerima pendidikan kewarganegaraan menunjukkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menerima pendidikan ini. Hal tersebut, pasalnya dikemukakan oleh Izam Agus Setiawan. Sedangkan menurut peneliti Zamroni penanaman nilai demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan berbagai fasilitas yang dibuat di sekolah. Dalam pendidikan kewarganegaraan, Zamroni menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan, dan patriotisme (Winataputra & Sapriya, 2021). Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa pendidikan demokratis harus memberi mahasiswa pemahaman tentang berbagai perbedaan dan kemampuan untuk membuat keputusan demokratis. Dalam beberapa penelitian ini, pendidikan kewarganegaraan dilihat sebagai sarana penting dalam meningkatkan tingkat partisipasi demokratis di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membantu siswa memahami nilai-nilai demokrasi, memiliki keterampilan kognitif dan partisipatori, serta memiliki disposisi yang mendukung

demokrasi(Adnan, 2005). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi demokratis di Indonesia.

3) Teknologi dan Media Sosial dapat Digunakan untuk Memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital

Penggunaan teknologi dan media sosial secara efektif, Pendidikan Kewarganegaraan di era digital dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan memahami isu-isu kewarganegaraan dengan lebih baik. Maka dari itu, teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan di era digital dengan cara berikut:

- a) Integrasi literasi digital: Literasi digital memungkinkan mahasiswa menggunakan dan memahami teknologi. Literasi digital ini mencakup kemampuan dalam memilih informasi yang tepat, menganalisis secara kritis, dan berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial.
- b) Penggunaan media sosial: Menggunakan media sosial untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, meningkatkan akses ke informasi politik, memobilisasi aktivis politik, dan meningkatkan transparansi pemerintah. Namun, efek buruk seperti penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan ujaran kebencian juga harus diperhatikan.
- c) Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akses informasi: Teknologi digital, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi yang relevan dengan isu-isu kewarganegaraan. mahasiswa dapat mengakses sumber daya online seperti situs web pemerintah, jurnal akademik, publikasi internasional, dan platform pendidikan yang menyediakan konten berkualitas. selain itu, dengan adanya teknologi digital, dapat mempermudah akses dalam mendapatkan informasi yang terkini dan beragam. Sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan up-to-date tentang kewarganegaraan, hak asasi manusia, demokrasi, dan isu-isu sosial yang relevan(Kariadi, 2016).

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam demokrasi Indonesia hal ini bisa mendorong mahasiswa agar berperan aktif dalam diskusi mengenai politik dan pemilu serta

berpikir kritis dan menghargai serta menghormati keberagaman Indonesia. Melalui teknologi dan media sosial diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, dengan adanya media sosial dapat memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat mengenai isu-isu yang berkembang di dunia dan menganalisisnya secara kritis dengan memilah kebenaran dari informasi yang didapatkan. Penggunaan media sosial memudahkan tetapi juga dapat memberikan dampak buruk seperti tersebarnya hoaks, polarisasi politik hingga ujaran kebencian yang harus diperhatikan. Kemudahan mendapatkan informasi yang terikini dan beragam serta up-to-date tentang hak asasi manusia, demokrasi dan isu yang relevan. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi Indonesia. Maka dari itu, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan baik, diharapkan mampu membantu meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, Indonesia dapat menghasilkan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab yang dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara dan diri mereka sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, kami penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Kami penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu rekan-rekan tim peneliti yang telah bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami penulis juga berterima kasih kepada dosen mata kuliah Kewarganegaraan, Bapak Drs. Imam Ghazali, MM., yang senantiasa mendampingi kami sebagai penulis sehingga kepenulisan yang kami kerjakan dapat selesai dengan tepat waktu. Kami penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan penelitian ini di masa depan. Akhir kata, kami penulis berharap jurnal penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.

Referensi

Adnan, M. F. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pada Era

Demokratisasi. *Jurnal Demokrasi*, 4(1), 63–76.

<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/998>

Aragati, A. H., Widiastuti, E., Andria, M. L., Hudi, I., & Saputra, R. S. (2024).

Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Digital fenomena yang berkaitan dengan Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan . Pendekatan. 2.

cora, elly novianti. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 334–354.

Fatimah U, G. N., Azzahra S, N., Aulia A, N., & Maudy H.P, R. (2023). Membangun

Kewarganegaraan Aktif dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi

Pendidikan Kewarganegaraan. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4),

215–219.

<https://adshr.org/index.php/vo/article/view/27%0Ahttps://adshr.org/index.php/vo/article/download/27/25>

HARIYANTO, H. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap

Pembangunan Karakter Bangsa. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 95–100. <https://doi.org/10.51878/learning.v1i1.205>

Kariadi, D. (2016). Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan Untuk

Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 1(1), 14.

<https://doi.org/10.26737/jpipsi.v1i1.112>

Pendidikan, J. (2023). *educandumedia*. 02(01), 79–88.

Sugara, H. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *Jurnal Koulutus*, 5(1), 103–116.

<https://doi.org/10.51158/koulutus.v5i1.822>

Winaputra, U. S. (2014). PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

DALAM KONTEKS KURIKULUM 2013. *Jurnal PPKn*, 2(Januari), 1–43.

Winataputra, S., & Sapriya, M. E. (2021). *Paradigma Baru Modul PKn SD*. 1–46.